

PEREMPUAN BERGERAK

bersatu bersama lawan tirani



**Seperempat Abad Menjadi
Kawan Baik Perempuan**



Perempuan Bergerak

Edisi I
Januari-Maret
2010

rembug perempuan

- 3** Seperempat Abad Mendorong Perubahan bagi Perempuan di Indonesia

fokus utama

- 4** Seperempat Abad Menjadi Kawan Baik Perempuan

opini

- 6** 25 Tahun Kalyanamitra Bertahan di Tengah Krisis

warta perempuan

- 9** 25 Tahun Kalyanamitra: Tetap Berpihak pada Kelompok Marginal

warta komunitas

- 11** Koperasi versus 'Bank Plecit'
12 Berkelompok Memperkuat Diri
13 Warung Soto dan Pembuatan Aksesoris

perspektif

- 14** Bagaimana Merayakan Hari Perempuan Internasional?

sosok

- 16** Syarifah Sabaroedin: Lahir Sebelum Masanya, Pergi Sebelum Waktunya

bedah film

- 18** Merebut Hak Pilih Perempuan

bedah buku

- 20** Fakta Sejarah Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia oleh Rezim Orde Baru

puisi

- 22** Wanita Perkasa

pojok kata

- 22** Hari Perempuan Sedunia
23 Feminisme
23 Gerakan Perempuan
23 Komunitas

Perempuan Bergerak

Penanggung Jawab: **Rena Herdiyani**

Pemimpin Redaksi: **Hegel Terome**

Redaktur Pelaksana: **Joko Sulistyio**

Redaksi: **Naning Ratningsih, Listyowati, Nani Ekawaty, Rakhmayuni, Ika Agustina**

Desain visual: **Rudy Fransiskus**

Distribusi : **Diana Tambunan**

Perempuan Bergerak merupakan media yang memuat pandangan-pandangan yang membangun kesadaran kritis kaum perempuan di seluruh Indonesia sehingga memberdayakan dan menguatkan mereka. Kekuatan bersama kaum perempuan yang terbangunkan itu merupakan sendi-sendi penting terdorongnya gerakan perempuan dan sosial umumnya untuk menuju masyarakat yang demokratis, setara, tidak diskriminatif dan tidak subordinatif.

Redaksi menerima kritik, saran dan sumbangan berupa surat pembaca, artikel dan foto jurnalistik. Naskah, artikel dan foto jurnalistik yang diterima redaksi adalah yang tidak anti demokrasi, anti kerakyatan, diskriminatif dan bias gender. Naskah tulis diketik pada kertas A4, spasi satu, huruf Arial 12, maksimal 3 halaman dalam bentuk file atau print-out.

Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Kaca Jendela II No.9 Rawajati-Kalibata, Jakarta Selatan 12750. Telp: 021-7902109; Fax: 021-7902112; Email : ykm@indo.net.id; Website : www.kalyanamitra.or.id

Untuk berlangganan *Perempuan Bergerak* secara rutin, kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi.

Redaksi menerima sumbangan pengganti biaya cetak Rp. 10.000,- dan biaya pengiriman di rekening sesuai kota tujuan. Transfer ke Rekening Bank Bukopin Cabang Kalibata, No. Rekening 0103-034652 a/n. Rena Herdiyani.

Seperempat Abad Mendorong Perubahan bagi Perempuan di Indonesia

Peran dan posisi kaum perempuan di Indonesia meskipun masih harus menempuh jalan panjang kemenangan, namun satu dekade belakang makin banyak diperdebatkan dan diperjuangkan.

Dalam berbagai tingkatan, kepentingan kaum perempuan masih tetap memprihatinkan, sekalipun satu dua hal dalam hal-hal tertentu cukup berhasil memenangkan pertarungan sengit dengan sistem kekuasaan dan budaya yang ada. Misalnya, dari ratusan UU yang dihasilkan DPR dan Pemerintah hingga kini, sedikit UU yang khusus membela kepentingan perempuan. Sebagian besar hanya mengabdikan kepada kekuasaan, yang mayoritas berada di tangan laki-laki.

Dalam posisi rentan sepanjang sejarah, kaum perempuan makin menjauh dari berbagai hak kepentingannya. Akses yang serba terbatas, menjadikan mereka warga negara dan dunia kelas dua. Kenyataan itu di Indonesia memperlihatkan wajah yang kusam. Sosok perempuan selama ini dipahami sebagai orang lemah, terbelenggu dan tergantung, yang harus di rumah dan dininabobokkan dengan konsumerisme dan hedonisme kapitalisme.

Keterlibatan perempuan dalam gerakan menuntut kekuasaan agar setara sudah dimulai dua abad nan lampau. Kaum perempuan di negeri-negeri yang maju telah merapatkan barisan menuntut hak kepentingan mereka. Mulai dengan ga-

gasan kesetaraan yang tradisional sampai kursi kekuasaan pun menjadi incaran perjuangan perempuan.

Kini, melongok pada apa yang pernah dikerjakan Kalyanamitra, maka tampak jelas dari sejarah awal pembentukannya, bukan perkara mudah mengajak perempuan mau mengerti pentingnya hak-hak mereka direbut dan diperjuangkan. Suatu ajakan motivasional belumlah tentu mendorong mereka terlibat kegiatan-kegiatan yang tersedia, apabila tidak dilandasi oleh kebutuhan konkrit tertentu.

Dalam rentang usianya yang ke-25 tahun, Kalyanamitra mencoba menjadi bagian dari gerakan sosial, dan gerakan perempuan khususnya. Kisah-kisah itu dapat sidang pembaca simak dalam rubrik-rubrik yang kami sajikan di buletin ini. Tentu, sembari merayakan hari penting bagi kaum perempuan, yakni Hari Perempuan Sedunia. Semoga jaya!

Jakarta, 28 Maret 2010

*Joko Sulistiyo
Redaktur Pelaksana*

Seperempat Abad Menjadi Kawan Baik Perempuan

*“Perlawanan itu menyenangkan, sebab memacu ketabahan; pengingkaran bagus sekali sebab menumbuhkan pengakuan dalam hidup; penolakan memberi kesukaan sebab menumbuhkan harga diri menjadi pernyataan berani dan kesadaran akan harga diri!”
(Kartini, Jepara, 21 Desember 1900)*

Setiap zaman pastilah menghadirkan anak-anaknya sendiri. Demikian kata bijak lama yang agaknya masih berlaku sampai kini. Tak sekadar itu, setiap zaman pun saling memiliki pertautan makna. Dalam konteks sejarah, masa lampau adalah mata rantai masa kini dan masa depan. Selalu ada benang merah dari suatu peristiwa dalam zaman tertentu maupun pertautannya antar zaman.

Apa yang terjadi dalam gerakan perempuan di banyak negeri dapat menjadi contoh konkret bagaimana pertalian sejarah itu tersimpul. Feminisme baru berkembang ketika gelombang industrial melanda Eropa, Inggris khususnya. Berabad-abad perempuan hidup dalam zaman kegelapan (*dark ages*). Ketika Eropa memasuki masa pencerahan (*enlightenment*), maka ruang kesempatan terbuka lebar bagi perempuan mengekspresikan kemerdekaan pilihan-pilihan hidupnya di ruang publik, yang sebelumnya, ruang itu hanya milik laki-laki. Maka, di Eropah tradisi penguasaan kerajaan-kerajaan perlahan-lahan terjadi peralihan dari laki-laki kepada perempuan (*from king to queen*). Perubahan ini tidak merata di semua kerajaan, namun kasus-kasus yang muncul menjadi penanda zaman bahwa fajar baru kepemimpinan sudah terjadi.

Berabad kemudian, pergerakan perlawanan menemukan bentuknya. Dengan feminisme gelombang pertama di Eropa, kaum perempuan menuntut hak-hak politiknya, yakni mulai dari hak untuk “memilih” kemudian hak untuk “dipilih”. Perubahan sosial semacam ini bukan tanpa konsekuensi. Dunia laki-laki yang tadinya dijaga dalam kesucian tradisi patriarkhal kemudian diblejeti tanpa ampun. Kekuasaan laki-laki seketika terguncang. Laki-laki runtuh kejayaannya. Di mana-mana kelompok-kelompok perempuan melancarkan demon-

trasi menuntut hak pemotongan jam kerja, gaji yang sama, keselamatan di tempat kerja. Kaum pemodal mulai terganggu oleh aksi-aksi kaum perempuan masa itu.

Berpuluh tahun kemudian, gerakan gelombang feminisme pertama diikuti oleh gelombang feminisme kedua dan ketiga. Semua gelombang gerakan ini terus mengusung berbagai tuntutan strategis dan praktis di mana-mana negeri. Salah satu negeri yang terpengaruh oleh gelombang gerakan feminis itu adalah Indonesia. Sejak masa Kartini, ide-ide feminis sudah dibicarakan secara intensif meskipun pelaku sejarahnya baru sebatas satu dua orang. Dan uniknya, ide kemerdekaan perempuan menyatu dengan ide kemerdekaan Indonesia.

Dalam perjalanannya, kita ketahui bahwa perjuangan kaum perempuan tak hanya dilakukan melalui partai politik yang cita-cita dasar umumnya ialah perlawanan merebut kemerdekaan, melainkan melalui organisasi-organisasi bentuk perempuan itu sendiri. Melalui organisasi yang ada itulah, suatu perjuangan memenangkan kepentingan kaum perempuan menjadi lebih sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Akan tetapi, tidak dalam setiap kurun waktu perjuangan itu mampu menghantarkan kaum perempuan pada harapannya. Buktinya, memasuki masa kemerdekaan dan Orde Baru, kehidupan gerakan perempuan Indonesia melemah dan tertundukan pada kepentingan rezim yang berkuasa. Dan yang paling parah, ketika Orde Baru berkuasa, rezim ini memotong habis radikalisme kaum perempuan, menjinakkan mereka menjadi gerakan “ibuisme”. Perempuan menjadi pendukung laki-laki dalam pembangunan. Dengan demikian, kembalilah kita ke abad kegelapan.

Sejak akhir 1965 ketika Orde Baru mulai ber-tahta, gerakan perempuan mengalami pengh-

“Kami mencoba untuk menghubungkan orang-orang yang mengalami masalah di level bawah untuk bisa dibicarakan dan diangkat ke permukaan.”

Sita Aripurnami

curan sampai ke akar-akarnya. Kemudian Orde Baru menempatkan perempuan ke dalam suatu wadah yang diwujudkan demi kepentingan rezim ini. Intinya, perempuan dijadikan pelayan suami atau laki-laki untuk mewujudkan pembangunan ala Soeharto. Maka, dibentuklah organisasi seperti Dharma Pertiwi dan lainnya. Semua itu untuk menjinakan perempuan. Peristiwa ini berlangsung hingga dekade 80-an.

Kemunculan Kalyanamitra sebagai organisasi perempuan merdeka dalam kurun Orde Baru berkuasa, barang tentu berkaitan dengan munculnya ide perlunya sentra informasi mengenai perempuan. Maka, pada 28 Maret 1985 berdirilah Kalyanamitra, sebagai respon terhadap situasi dan kondisi kala itu. Bertemu dan bersepakatlah lima perempuan waktu itu untuk membentuk wadah bagi kepedulian terhadap perempuan. Diberi nama Kalyanamitra, dalam bahasa Sanskrit artinya “kawan baik”. Kelima perempuan itu ialah: Ratna Saptari, Myra Diarsi, Sita Aripurnami, Debra Yatim, dan Syarifah Sabaroeddin. Pada akhirnya berdirilah Kalyanamitra sebagai pusat informasi dan komunikasi perempuan.

Apa yang dikerjakan Kalyanamitra awalnya boleh dikatakan begitu sederhana secara teknis, namun sangat strategis visinya. Kegiatan yang dilakukan dimulai dengan pengumpulan informasi mengenai isu-isu perempuan yang didapat dari koran, makalah, majalah, referensi tentang teori ilmu-ilmu sosial, dan studi perempuan. Dari bahan itu disusun, selanjutnya dibuat klipring. Bahan dan data tentang perempuan disimpan dalam satu tempat, yaitu perpustakaan Kalyanamitra. Perpustakaan ini terbuka untuk umum, dan buku-buku yang disediakan bisa dibaca ditempat (Panasea 43, 14-27 November 1992, hal 44-45).

Kegiatan pertama yang dilakukan Kalyanamitra adalah mencoba menyebarkan informasi tentang studi perempuan yang telah dilakukan. “Kami mencoba untuk menghubungkan orang-orang yang mengalami masalah di level bawah untuk bisa dibicarakan dan diangkat ke permukaan,” kata Sita (Panasea 43, idem).

Kegiatan dan kepedulian Kalyanamitra mulai berdentung saat mengangkat masalah pembantu rumah tangga dan hak asasinya. Pada saat memecahkan masalah itu, Kalyanamitra bergerak bersama LBH dan bekerja sama dengan Depnaker. Pada masalah pembantu rumah tangga ini yang dilihat adalah pekerjaannya. “Sebab yang namanya pembantu itu kadang-kadang selalu mendapat

perlakuan kurang baik dari majikannya. Kalyanamitra tersentuh untuk mencoba mengangkat keberadaan pembantu rumah tangga dari semua sisi, baik itu jam kerja atau juga perlakuan majikannya,” lanjut Sita (Panasea 43, idem). Khusus tentang perkosaan, Kalyanamitra pernah mengadakan kajian mendalam. Pada 1991, diselenggarakan lokakarya “Kampanye Nasional Anti Perkosaan” yang menghadirkan sejumlah ahli. Untuk masalah pelacuran, Kalyanamitra pernah mengupas tuntas. Pandangannya jelas, yakni menolak tegas bahwa perempuan diciptakan menjadi objek seks. Kalyanamitra menolak pandangan tentang peran sosial, karakter, dan seksual perempuan yang menindas perempuan (KR, 25 April 1991, idem).

Sejak berdirinya, Kalyanamitra bergerak dalam beberapa isu yang diangkat ke permukaan, seperti masalah pembantu rumah tangga, pelacuran, perkosaan, dan pelecehan seksual lainnya. Semua kegiatan berhubungan erat dengan keberadaan perempuan (peran, kondisi, kedudukan). Peran yang dijalankan Kalyanamitra mulai tampak terlihat dengan semakin banyaknya kepedulian para perempuan dan laki-laki terhadap hak asasi perempuan, dalam suatu seminar, simposium, dan juga pelatihan-pelatihan. Mereka yang bergabung datang dari segala disiplin ilmu. “Kami mencoba merumuskan masalah-masalah perempuan atau menanggapi berbagai isu tentang perempuan dalam masyarakat,” kata Myra Diarsi (KR, 25 April 1991, hal V).

Keberadaan Kalyanamitra benar-benar tegak sendiri, lepas dari pemerintah. Kalyanamitra menjalankan fungsinya benar-benar sebagai suatu wadah sosial, bekerja sama dengan LSM lainnya. Demikian bantuan dana yang didapat hanyalah bantuan tanpa mengikat dari lembaga lain.

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, keberadaan Kalyanamitra pada awalnya memang mendapat sedikit hambatan. Itu mungkin karena pihak tersebut belum mengerti peran apa yang dimainkan.

Sekarang, setelah memasuki usianya yang seperempat abad, peran dan posisi Kalyanamitra tentu amat strategis dalam memahami kepada publik mengenai berbagai isu dan keberadaan perempuan melalui kerja-kerja konkrit. Pada gilirannya, kehadiran Kalyanamitra dalam kancah gerakan perempuan di Indonesia tentu hendak menjadi kawan sejati perempuan di mana saja dan kapan saja, dalam meraih hak-haknya dan tanggung jawabnya. Semoga. *** (HG)

“Kami mencoba merumuskan masalah-masalah perempuan atau menanggapi berbagai isu tentang perempuan dalam masyarakat.”
Myra Diarsi

25 Tahun Kalyanamitra
28 Maret 1985 - 28 Maret 2010

Bertahan di Tengah Krisis

Oleh: Ruth Indiah Rahayu *

Catatan kesan ini saya dedikasikan dengan sepenuh penghargaan dan penghormatan kepada keseluruhan aktivis yang mengaggas, mendirikan, membangun dan mempertahankan Kalyanamitra hingga mampu berusia 25 tahun.

Teriring doa kepada Syarifah Sabaroedin, seorang pendiri Kalyanamitra, yang berpulang mendahului keseluruhan aktivis Kalyanamitra, setahun yang lalu.

Duapuluh lima tahun bagi manusia boleh dibilang dewasa, namun tak serta merta dengan perjalanan hidup sebuah organisasi perempuan. Kalyanamitra, sebuah organisasi perempuan yang didirikan dalam suasana rezim Orde Baru, saya syukuri masih mampu mencapai hidup 25 tahun. Sesuatu keadaan yang belum tentu mampu dicapai oleh sebuah organisasi perempuan, karena berbagai faktor yang berkait-kelindan dengan situasi ekonomi politik nasional dan global. Maka, ketika saya diminta untuk menuliskan kesan terhadap Kalyanamitra, rasanya tak bisa saya lepaskan dari dinamika organisasi ini bertanding berhadapan dengan dominasi kekuasaan atas nama negara. Dari sinilah saya mengajukan perspektif menurut fase kepemimpinan di Kalyanamitra untuk mengungkapkan kesan saya terhadapnya.

Fase Kepemimpinan Pertama: Revitalisasi Identitas Perempuan

Kalyanamitra didirikan ketika rezim Orde Baru sedang mencapai pementaban kekuasaan di satu sentral Soeharto dan keluarganya, berbareng dengan rezim kapitalis internasional mengeluarkan kebijakan neoliberal untuk menjadikan negara-negara seperti Indonesia sebagai pasar bebas. Sekali pun rezim Orde Baru menerima proposal PBB untuk memperhatikan nasib perempuan dalam pembangunan dan meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada 1984 (CEDAW), namun kenyataan politiknya yang otoritarian terhadap perempuan tidak berubah.

Di bawah rezim politik seperti itu, orang perempuan yang menggagas dan mendirikan Kalyanamitra menurut pandangan saya adalah para pelopor revitalisasi identitas perempuan, di mana identitas perempuan ini secara politik telah ditempatkan sebagai *koncowinking* (pasangan laki-laki di bagian 'belakang' untuk urusan dapur) oleh

rezim Orde Baru. Faktanya, organisasi perempuan Orde Baru memang hanya difungsikan sebagai *koncowinking* kepentingan politik suaminya, sehingga identitas perempuan sebagai insan politik yang otonom hilang.

Penggagas dan pendiri Kalyanamitra dalam pandangan saya adalah para perempuan yang berani mengambil resiko berlawanan dengan pandangan rezim. Untuk masa itu merupakan kepeloporan yang luar biasa bagi perempuan, apalagi berani merambah aspek ketenagakerjaan (buruh) yang mendapat stigma politik "terlarang" oleh rezim. Disamping itu kawan-kawan perempuan pelopor ini masih harus bertanding di domain kesadaran yang berkonsekuensi pada perjuangan ganda: di sari puhak, mereka harus bertanding di domain perempuan, dan di pihak lain harus bertanding di domain yang didominasi laki-laki. Maka revitalisasi identitas perempuan yang saya pahami adalah upaya kawan-kawan Kalyanamitra untuk mengangkat identitas perempuan yang hilang melalui pengangkatan (kampanye) problem-problem perempuan sebagai tenaga kerja dan seksualitas.

Di bawah kepemimpinan Ratna Saptari dan kemudian Sita Aripurnami, fase revitalisasi identitas perempuan yang mulanya berfokus pada tenaga kerja dan seksualitas bergeser hanya pada fokus seksualitas. Di sini Kalyanamitra melansir tema kekerasan terhadap seksualitas perempuan dan sekaligus memblejeti otoritarianisme Orde Baru yang melakukan praktek kekerasan terhadap perempuan, contohnya dalam Operasi Safari Keluarga Berencana. Rupanya tema kekerasan terhadap perempuan berhasil merebut wacana publik dan mengangkat adanya identitas perempuan yang hilang.

Fase Kepemimpinan Kedua: Konsolidasi Menumbangkan Rezim Orde Baru

Meski tidak saya nyatakan secara angka tahun, fase ini berada di sekitar pertengahan dekade 1990-an. Fase ini dipimpin oleh Ita Fatia Nadia dan ditambah adanya regenerasi di dalam Kalyanamitra

yang terdiri dari aktivis gerakan mahasiswa. Pada masa ini, situasi ekonomi-politik global sedang mengalami krisis, dan lebih jauh krisis ini menjadi titik tolak krisis di dalam rezim Orde Baru. Ruang krisis ini mengkonsolidasi berbagai elemen gerakan sosial dan mahasiswa untuk menumbangkan rezim Orde Baru. Kalyanamitra menggunakan ruang krisis ini untuk mengkonsolidasi elemen-elemen perempuan termobilisasi ke dalam gerakan sosial penumbangan rezim. Sekali pun jalur politik yang dipilih Kalyanamitra tidak terlepas dari tema kekerasan terhadap perempuan.

Dalam pandangan saya, pada fase ini Kalyanamitra sesungguhnya mengajukan rumusan tentang politik korban. Perempuan adalah korban politik dan karenanya dibangkitkan sebagai kekuatan politik perlawanan. Perspektif hak asasi manusia sangat kuat mewarnai politik Kalyanamitra, sebagai sebuah pilihan berpolitik melawan rezim.

Publik kemudian terbuka matanya bahwa ada kejahatan rezim yang disembunyikan, yang menyentak harga diri keindonesiaan dan nurani alamiah saat kejahatan seksual terhadap perempuan terungkap dilakukan Orde Baru sejak Tragedi Oktober 1965, di berbagai operasi militer di Aceh-Papua-Timor Leste, hingga Kerusuhan Mei di Jakarta 1998.

Dalam fase ini, Kalyanamitra secara langsung berhadapan dengan aparat militer rezim Orde Baru -sebagai pelaku kejahatan terhadap seksualitas perempuan. Sekaligus dapat memobilisasi relawan perempuan dari masyarakat untuk membantu korban kekerasan menjelang Soeharto turun dari jabatannya.

Fase Kepemimpinan Ketiga: Transisi Pasca-Orba

Saya berpendapat pada fase ini Kalyanamitra mencapai keadaan transisi, sebagai pengaruh dari transisi politik Indonesia saat itu. Dalam perubahan Indonesia menuju sistem yang diharapkan demokratis, disadari atau pun belum, kesadaran warga negara Indonesia saat itu semata diarahkan untuk merevisi paket undang-undang politik, yang substansinya adalah memprosedurkan sistem keterwakilan melalui pemilu dan parlemen. Sebagian besar dari elemen organisasi perempuan menggunakan peluang ini untuk affirmative action penentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik.

Situasi transisi itu cukup sulit untuk dilalui oleh

Kalyanamitra karena secara cepat harus merumuskan apa makna transisi Indonesia pasca-Orde Baru. Pada akhirnya Kalyanamitra memaknai transisi politik Indonesia harus melalui *transitional justice* (keadilan transisional). Asumsinya bahwa transisi Indonesia menuju demokrasi harus dicapai melalui tanggungjawab negara untuk penyelesaian kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam operasi militer maupun pembiaran di dalam praktek sosial sehari-hari -yang hal ini menuntun negara untuk menyediakan fasilitas *crisis centre*. Pada fase transisi ini Kalyanamitra dipimpin oleh kolektif yang terdiri dari Sekar Pireno, Siti Kholipah, Astrid Chrisafi dan Firziana Roosnaleli.

Namun, sekali lagi, dalam transisi Indonesia pada masa itu terdapat ruang-ruang konstestasi -bahkan di kalangan organisasi perempuan-- yang dipaksa dikotomis antara yang berjuang untuk keterbukaan politik (melalui keterwakilan perempuan) versus *transitional justice* (melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi). Pilihan Kalyanamitra pada koridor *transitional justice* membuatnya ditenggelamkan ke dalam arus besar gerakan kebijakan (seperti yang telah direncanakan secara sistematis oleh rezim neoliberal melalui IMF dan World Bank) Sampai di sini, saya melihat kegamangan Kalyanamitra: untuk tetap melawan atau bermitra dengan penguasa negara yang baru. Dalam fase transisi ini kegiatan Kalyanamitra antara lain diarahkan untuk mempersiapkan regenerasi yang melanjutkan kepemimpinan Kalyanamitra berikutnya.

Fase Kepemimpinan Keempat: Bertahan di Tengah Krisis

Regenerasi baru Kalyanamitra terdiri dari para perempuan yang tidak mengalami cara langsung represi Orde Baru, apalagi melakukan perlawanan dan penumbangan. Namun, kawan-kawan muda ini harus memikul beban transisi Indonesia-yang sejarah politiknya tak pernah mereka ketahui sebelumnya, dan pula harus merumuskan proyek politik Kalyanamitra dalam situasi ini. Fase yang dipimpin oleh Rena Herdiyani, dengan armada organisasinya yang mempunyai kekuatan dalam kerelawanan sosial ternyata teruji sigap menjawab problem bencana alam besar yang melanda Indonesia sejak gempa dan tsunami di Aceh pada 2004 melalui metode kerja pembangunan *crisis centre* untuk perempuan korban bencana.

**Resep awet umurnya Kalyanamitra ada pada kunci:
berjalannya regenerasi bahkan di saat transisi, di mana regenerasi
tersebut dapat menanggapi kondisi ekonomi-politik yang menimpa
perempuan dalam setiap fase perjalanan politik Indonesia.**

Pada perkembangannya Kalyanamitra me-
maknai bencana alam sebagai bencana ekonomi
politik yang menimbulkan krisis pada kehidupan
perempuan karena beban tanggungjawab atas
fungsi reproduksi sosial. Atas pemaknaan ini Ka-
lyanamitra turun ke basis untuk memberikan pen-
erangan dan melahirkan kelompok perempuan un-
tuk memimpin dirinya survival dari krisis ekonomi
politik global yang menguat kembali pada 2007. Di
samping itu, Kalyanamitra tetap melakukan pem-
blejetan adanya diskriminasi terhadap perempuan
di masa yang disugestikan telah mencapai konsoli-
dasi demokrasi.

Tantangan Setelah 25 Tahun

Setelah merentangkan perjalanan hidup Kalyanamitra seperti itu, saya berpendapat bahwa re-
sep awet umurnya Kalyanamitra ada pada kunci:
berjalannya regenerasi bahkan di saat transisi, di
mana regenerasi tersebut dapat menanggapi kon-
disi ekonomi-politik yang menimpa perempuan
dalam setiap fase perjalanan politik Indonesia.

Tentulah, setelah mampu mencapai usia 25
tahun Kalyanamitra tidak seharusnya mengkerut
dan hancur. Sebab, Kalyanamitra akan mengh-

adapi tantangan baru yang dapat menyebabkan:
hancur atau terjadi revitalisasi. Saya tak berharap
Kalyanamitra hancur, justru sebaliknya, setelah
25 tahun usianya saya berharap mengalami revi-
talisasi gerakannya dengan melanjutkan berbagai
daya upaya untuk memblejeti krisis ekonomi-poli-
tik yang ditanggung perempuan (baca: Ibu) “sen-
dirian” di domain reproduksi sosial. Dalam hal ini,
barangkali Kalyanamitra dapat berputar kembali
pada suasana di fase kedua untuk mengungkap
realitas bahwa “musuh perempuan belum sirna
di Indonesia”. Sebab krisis ekonomi yang terjadi
ketika Kalyanamitra berada pada fase kedua itu
sama sekali tidak pernah menjadi agenda poli-
tik pimpinan negara sampai pada saat ini. Alha-
sil, pemiskinan, kekerasan, dan angka bunuh diri
perempuan makin meningkat di saat kuota 30
persen keterwakilan perempuan dalam politik
mempunyai capaian.

Pada akhirnya, jika Kalyanamitra hendak men-
capai usia 50 tahun, upaya meregenerasi harus
terus berlangsung, seperti halnya manusia dan
alam yang senantiasa meregenerasi dirinya. ***

** Seorang yang pernah belajar dan bekerja di Ka-
lyanamitra.*



“Kalyanamitra telah ikut berkontribusi
atas maraknya wacana feminisme masa
pemerintahan Soeharto dan turut pula
terlibat menurunkan rezim Soeharto.
Konsep Ibuisme Negara yang digerakkan
pemerintahan Soeharto yang menghege-
moni dan mendomestikkan perempuan
melalui berbagai organisasi seperti PKK,
Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi yang
kini secara substansi telah mengalami
perubahan adalah sebagai akibat wacana
feminisme dan pemenuhan hak asasi
perempuan yang cukup lama digulirkan
oleh Kalyanamitra.”

Masruchah, Komisioner Komnas Perempuan



“Kalyanamitra ingin mendukung kerja
berbagai pihak dalam penguatan buruh
dengan memberi informasi tentang hak
mereka, bahwa mereka layak mendapat-
kan upah yang sama, berhak mendapat-
kan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.”

Ari Sunarja, Relawan Kalyanamitra 1985-
1990



“Sebagai pionir dalam memperjuangkan
hak-hak perempuan dan kesetaraan gen-
der, Kalyanamitra telah membuka mata
adanya masalah-masalah ketimpangan
gender. Kalyanamitra telah memberikan
wacana baru pada pemerintahan Orde
Baru dan cukup berani mengangkat isu-isu
yang masih sensitif.”

Danti, Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPP
& PA)

25 Tahun Kalyanamitra: Tetap Berpihak pada Kelompok Marginal

“Kalyanamitra saat itu berdiri karena belum banyak atau hampir tidak ada yang melihat bahwa perempuan memiliki persoalan sosial. Kita mendedikasikan semua sumberdaya dalam hal buku, barang-barang publikasi, makalah atau film secara bersama-sama oleh lima orang badan pendiri untuk membentuk komunikasi dan informasi wanita” (Sita Aripurnami, Pendiri Yayasan Kalyanamitra)

Berangkat dari tidak adanya pihak yang melihat bahwa perempuan memiliki persoalan sosial, inilah tonggak berdirinya Yayasan Kalyanamitra tahun 1984. Saat itu belum banyak organisasi perempuan yang ada. Kalyanamitra sebagai organisasi perempuan kedua, lahir setelah Yayasan Anisa Swasti di Yogyakarta. Awal berdirinya Kalyanamitra ingin mendukung kerja berbagai pihak dalam penguatan buruh dengan memberi informasi tentang hak mereka, bahwa mereka layak mendapatkan upah yang sama, berhak mendapatkan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.

Masa awal diskusi-diskusi rutin mengenai buruh diadakan di kantor Yayasan Kalyanamitra setiap dua kali seminggu. Hal tersebut diungkapkan Ibu Ari Sunarjati, sebagai salah satu relawan waktu itu. “Untuk membahas perburuhannya Kalyanamitra tidak punya relawan, akhirnya saya menyediakan diri menjadi relawan tahun 1985-1990; seminggu dua kali atau sesuai kesepakatan.” Diskusi-diskusi tersebut dirasa efektif untuk menyadarkan kelompok buruh dalam menggunakan haknya sebagai perempuan maupun buruh di perusahaan. Hasil konkrit diskusi yang secara intens dilakukan ini yakni membuat kelompok buruh menjadi berani. Di pabrik mereka bisa menjadi pengurus ketika pemilihan serikat buruh, dan bisa menjadi tim negosiator dengan pengusaha.

Memasuki tahun 1990, Kalyanamitra kemudian berpikir untuk bisa menarik suatu isu sosial yang menjadi persoalan bagi perempuan, yakni kekerasan terhadap perempuan dengan fokus perkosaan. Dengan mengangkat perkosaan, diharapkan segera dilihat bahwa ada persoalan besar yang dihadapi perempuan. Dari pengumpulan data, baik kepolisian maupun media masa antara tahun 1985-1990, ditarik kesimpulan setiap lima jam terjadi satu kali perkosaan di Indonesia waktu itu.

Berangkat dari data itu, dilakukan serangkaian

diskusi dan seminar yang akhirnya melahirkan istilah yang belum ada di Indonesia, yakni “pelecehan seksual”. Dari data tersebut juga dibangun jaringan dengan organisasi-organisasi perempuan untuk forum pembela perkara perempuan yang kemudian mendorong organisasi perempuan mendirikan crisis center. Banyak sumbangsih yang diberikan Kalyanamitra waktu itu, antara lain membuat orang sadar tentang masalah perempuan melalui isu perkosaan. Kemudian dilanjutkan dengan proses advokasi pentingnya merevisi KUHP mengenai pasal yang memberikan sanksi terhadap pemerkosa, dan ikut terlibat dalam perumusan draft Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagai salah satu organisasi yang lahir pada masa Orde Baru, Kalyanamitra juga dianggap sebagai salah satu pihak yang memberikan kontribusi berkembangnya wacana feminisme di Indonesia masa itu. “Saya berpikir bahwa Kalyanamitra telah ikut berkontribusi atas maraknya wacana feminisme masa pemerintahan Soeharto dan turut pula terlibat menurunkan rezim Soeharto. Konsep Ibuisme Negara yang digerakkan pemerintahan Soeharto yang menghegemoni dan mendomestikkan perempuan melalui berbagai organisasi seperti PKK, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi yang kini secara substansi telah mengalami perubahan adalah sebagai akibat wacana feminisme dan pemenuhan hak asasi perempuan yang cukup lama digulirkan oleh Kalyanamitra,” demikian ungkap Masruchah, Komisioner Komnas Perempuan.

Tak hanya Masruchah yang berpendapat demikian, Ibu Danti dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPP & PA) juga mengatakan hal yang senada. Sebagai pionir dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, Kalyanamitra telah membuka mata adanya masalah-masalah ketimpangan gender. Kalyanamitra telah memberikan wacana baru pada pemerintahan Orde Baru dan cukup berani mengangkat isu-isu yang masih sensitif.

Masa Reformasi 1998, Kalyanamitra juga dianggap telah mengambil peran yang cukup berarti dalam gerakan perempuan di Indonesia. Saat itu, untuk pertama kali gerakan perempuan menyusun satu kekuatan besar. Dari peristiwa tersebut peran perempuan mulai mengakar dan mengangkat ketidaksetaraan gender bukan hanya di ranah do-

mestik melainkan juga di ranah publik. Tahun 1998 merupakan gerakan awal perempuan Indonesia untuk lebih menyadari akan hak-haknya. Perubahan signifikan terjadi masa itu. Secara khusus, dalam wacana demokrasi dan isu kesetaraan gender telah menjadi arus utama dalam kehidupan negara. Memasuki 12 tahun Reformasi telah terjadi pengesahan produk-produk kebijakan yang melindungi kehidupan perempuan dan korban. Misalnya UU PKDRT, UU Kewarganegaraan, UU PTPPO, UU Politik yang mengatur affirmative action keterwakilan perempuan minimal 30%, dan Inpres No. 9 tahun 2000 yang mengatur tentang pengarusutamaan gender dalam seluruh program negara. Selain itu, pertumbuhan organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah dan bekerja untuk penegakan hak-hak perempuan berkembang pesat.

Dalam usianya yang ke-25 tahun, Kalyanamitra telah melakukan perubahan pola pikir dan perilaku kepada masyarakat, khususnya perempuan-perempuan baik muda dan dewasa melalui wacana dan memberi contoh langsung di komunitas-komunitas miskin. Banyak manfaat yang dirasakan oleh komunitas dampingan Kalyanamitra, seperti diungkap Ibu Lin dari Komunitas Muara Baru: “Ada pengetahuan, pengalaman, yang tadinya tidak tahu saya jadi tahu, sering diadakan seminar keluar jadi saya tahu banyak”.

Ibu Sari Devi dari Komunitas Prumpung juga mengungkapkan hal yang sama, setelah mengenal Kalyanamitra ia memperoleh pengetahuan baru berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga menjadi lebih berani karena ketika terjadi sesuatu terhadap dirinya atau lingkungan tempat tinggalnya ada hukum yang melindunginya serta tahu kemana harus mengadu.

Keberadaan Kalyanamitra juga sangat dirasakan manfaatnya oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan apa yang dihadapi dalam rumah tangga, mereka menemukan Kalyanamitra. Tidak hanya penguatan secara psikis yang mereka peroleh tapi juga pengetahuan-pengetahuan lain berkaitan dengan hak-hak perempuan. Dari kelompok survivor korban kekerasan dalam rumah tangga kemudian tahun 2004 lahir Paguyuban Mitra Kasih (PMK). Salah satu tujuan paguyuban ini ialah membentuk wadah untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tak hanya di lingkungan komunitas dampingan, kehadiran Kalyanamitra juga dirasakan kontribusinya oleh sesama organisasi perempuan, seperti diungkap Ibu Sri, dari Sapa Institut: “Kalyanamitra telah berkontribusi sangat besar terhadap gerakan Sapa Institut, selain berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas lembaga dan stafnya. Kalyanamitra juga ikut mendampingi kawan-kawan Sapa Institut

dari nol hingga mampu mengembangkan jaringan di nasional dan dengan lembaga donor. Hingga akhirnya, Sapa Institut mampu membangun komunitas-komunitas perempuan di tingkat lokal yang dampaknya sangat besar terhadap perubahan perempuan di kabupaten Bandung.”

Banyak harapan ditujukan pada Kalyanamitra setelah memasuki usia yang ke-25 tahun. Ibu Ari misalnya, sebagai salah seorang yang telah mengenal Kalyanamitra sejak tahun 1985 berharap Kalyanamitra dapat tetap berpijak pada visi misinya dan tetap memperhatikan kelompok akar rumput. Ibu Ari mengharapkan informasi yang publikasikan Kalyanamitra bisa juga dipahami kelompok akar rumput. Di bidang kebijakan pun, beliau berharap Kalyanamitra bisa menjadi leading sector di salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas 2010.

KNPP&PA yang selama ini telah memanfaatkan terbitan-terbitan Kalyanamitra sebagai masukan dalam membuat kebijakan juga mempunyai harapan untuk dapat memperkuat kerjasama yang lebih intens. Kerjasama antar pemerintah dan organisasi perempuan menjadi penting untuk mencapai tujuan yang sama yakni bagaimana agar perempuan lebih berkualitas, menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Kelompok komunitas dampingan Kalyanamitra, dari Muara Baru, Prumpung, Paguyuban Mitra Kasih (PMK), maupun komunitas kampus juga mempunyai harapan-harapan yang senada. Ke depan mereka berharap Kalyanamitra bisa tetap menjalin kerjasama dengan komunitas dan membuat kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan perempuan. Diharapkan pula dapat memperluas komunitas dampingan, karena masih banyak perempuan yang membutuhkannya.

Sapa Institut, salah satu mitra Kalyanamitra, berharap agar Kalyanamitra terus mengembangkan wacana feminisme dan menguatkan kembali kajian-kajian dan posisi Kalyanamitra sebagai pusat informasi dan komunikasi perempuan. Sedangkan Yasanti, organisasi perempuan Yogyakarta pun, berharap agar ke depan Yasanti dan Kalyanamitra dapat menjalin kerjasama secara langsung untuk penguatan perempuan dan kampanye isu perempuan khususnya untuk pekerja perempuan baik di sektor industri maupun non industri.

Melihat kompleksitas tantangan ke depan, persoalan kemiskinan yang makin tinggi dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah, Ibu Mascruhah berharap agar Kalyanamitra tetap bisa menjadi pionir dalam kerja-kerja untuk perubahan di tataran kultural dan struktural. Bagaimana persoalan di komunitas dapat disuarakan di tingkat nasional, dan isu-isu perempuan yang diadvokasi di tingkat nasional juga menjadi arus utama di tingkat komunitas, dan sebaliknya. ***(JK/DT)

Koperasi versus 'Bank Plecit'

Apa sih 'bank plecit' itu? Istilah ini mungkin tidak asing bila ditanyakan di kalangan ibu-ibu rumah tangga, apalagi yang tinggal di perkampungan. Atau, coba tanyakan para pedagang di pasar tradisional. 'Bank plecit' atau juga disebut bank keliling bisa diartikan sebagai bank berjalan. Hal ini karena cara penagihannya dilakukan ke rumah-rumah nasabahnya dan dilakukan setiap hari.

Salah satu sebab menjamurnya bank keliling karena sulitnya mendapatkan bantuan baik dari pemerintah maupun swasta. Bank keliling menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meminjam uang ketika ada kebutuhan mendadak atau sulit mendapatkan bantuan modal untuk membuka usaha. Proses pinjaman yang mudah membuat masyarakat lebih tertarik pada bank keliling. Adapun nasabah bank keliling ini lebih banyak dari kalangan pedagang dan ibu rumah tangga.

Bunga tinggi yang ditetapkan bank keliling, lewat 'ilusi' cicilan rendah setiap hari dianggap tidak akan terasa berat bagi pedagang kecil maupun ibu rumah tangga. Setiap hari mereka hanya menyeter cicilan Rp. 1000 yang ditagih ke rumah bagi ibu rumah tangga, atau ke pasar tempat mereka berdagang bagi para pedagang.

Soal penetapan bunga pinjaman bank keliling yang mencekik leher para nasabah, semua orang sudah mahfum. Untuk pinjaman Rp 2 juta misalnya, peminjam hanya mengantongi uang tunai Rp 1,8 juta karena dipotong langsung biaya administrasi 10%. Dengan bunga yang biasanya mencapai 20% per bulan, nasabah harus mengembalikan pinjaman Rp 2,4 juta. Dari pinjaman dalam tempo satu bulan itu, bank keliling mereguk keuntungan Rp 500 ribu.

Persoalan akan muncul ketika para nasabah ini tidak mampu membayar tagihan harian secara rutin. Pinjaman akan semakin banyak, bunga bank berjalan terus dan pinjaman bisa naik dua kali lipat dari jumlah aslinya.

Fenomena bank keliling ini juga muncul di komunitas dampingan Kalyanamitra. Melihat hal tersebut, anggota komunitas merasa penting memiliki koperasi yang bisa diakses oleh mereka. Dengan prinsip koperasi dari dan untuk anggota mereka berharap ketika ada kebutuhan medesak atau membutuhkan bantuan untuk modal usaha bisa memperoleh pinjaman dari koperasi. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan koperasi, yakni untuk mensejahterakan anggotanya.

Komunitas Prumpung adalah salah satu komunitas dampingan Kalyanamitra yang berharap

adanya koperasi di lingkungan mereka. Diskusi-diskusi untuk melahirkan koperasi pun diadakan di kalangan anggota komunitas dengan difasilitasi oleh Kalyanamitra.

Pada diskusi awal yang dilakukan di Kalyanamitra, lebih banyak mengungkapkan harapan anggota kelompok ketika koperasi nantinya sudah berdiri. Diskusi yang menghadirkan narasumber Mas Agung dari YAPPIKA lebih banyak membahas mengenai apa itu koperasi dan bagaimana cara mendirikan koperasi. Dalam hal ini ibu-ibu anggota komunitas terlihat sangat antusias. Dalam diskusi ini terlon-tar bahwa ketika akan membangun koperasi diperlukan pelatihan tentang koperasi dan bagaimana menjalankannya.

Menindak-lanjuti diskusi yang sudah dilakukan, maka awal Maret Kalyanamitra bersama Mas Agung melakukan pelatihan koperasi. Peserta pelatihan ini adalah mereka yang sebelumnya sudah terlibat dalam diskusi. Mereka juga nantinya diharapkan dapat menjadi pengurus koperasi, ketika koperasi sudah ada di tengah-tengah mereka.

Banyak harapan dilontarkan ibu-ibu peserta pelatihan. Sebagian besar harapan mereka adalah ingin lebih mengetahui tentang koperasi secara lengkap dan detail. Selain itu, mereka ingin bisa menguasai mengenai pembukuan dan manajemen. Hal lain yang tak kalah penting dari harapan para ibu-ibu anggota komunitas adalah ingin memperoleh pinjaman modal untuk membuka usaha.

Pemberian modal untuk usaha sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui PNPM Mandiri. Namun ternyata selama ini, masyarakat khususnya anggota komunitas dampingan Kalyanamitra tidak dapat memanfaatkan layanan tersebut karena prosedur yang dirasakan sangat berbelit.



Komunitas Prumpung.

Bantuan usaha juga sering disalurkan melalui kantor kelurahan atau kecamatan, tapi lagi-lagi karena berbelitnya administrasi dan prosedur, anggota komunitas cenderung tidak mau mengaksesnya. Hal itu kemudian membuat mereka memanfaatkan jasa 'bank plecit' atau bank keliling dengan resiko terjat dalam lingkaran rentenir.

Ke depan, dengan adanya koperasi yang bisa mereka akses dapat menghindarkan mereka dari ketergantungan pada bank keliling. Mereka dapat memperoleh pinjaman uang ketika ada kebutuhan mendesak dan pinjaman modal ketika ingin membuka sebuah usaha, tentu saja dengan bunga yang

lumayan kecil. Harapan lain ketika koperasi sudah terbentuk, mereka ingin ketika ada bantuan yang biasa disalurkan melalui kantor kelurahan maupun kecamatan mereka bisa mengakses melalui koperasi yang ada.

Keuntungan lain yang akan mereka peroleh ketika koperasi sudah berdiri dan mereka menjadi anggota koperasi adalah adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota. Pembagian SHU tentu saja tidak diperoleh di 'bank plecit'. *** (JK)

Berkelompok Memperkuat Diri

Program penguatan kelompok perempuan di desa Pasrujambe, Lumajang, sudah berjalan setengah tahun. Program Kalyanamitra ini sepenuhnya didukung oleh donor dari Jerman, yakni EED Germany. Program ini bekerjasama dengan lembaga lokal bernama Gemapalu. Penguatan kelompok perempuan di desa Pasrujambe dilakukan Gemapalu mulai tahun 2004. Dengan upaya keswadayaan, penguatan ini mendampingi lima kelompok perempuan di tingkat dusun dalam satu desa.

Awal tahun ini perkembangan kelompok-kelompok cukup menggembirakan. Salah satu keberhasilan yang bisa kita lihat, yakni ada kelompok yang sudah mampu mengelola uang tabungan menjadi unit-unit usaha lain. Salah satunya yakni kelompok Srikandi di dusun Suco. Kelompok ini berdiri tahun 2006 dan berhasil mengembangkan dana tabungan menjadi berbagai unit usaha, antara lain toko, produksi jamu, produksi ting-ting jahe, dan kios bensin.

Kelompok ini pun mampu mengelola uang simpan pinjam anggotanya. Menurut Sani, anggota kelompok Srikandi, saat ini kelompok mengelola sekitar Rp 10 juta dari unit usaha simpan pinjam, dan Rp 3 juta dari usaha toko. Belum ditambah dari unit usaha lain. "Padahal dulu modal awalnya 300 ribu" ujarnya. Keberhasilan ini memang tidak dibangun dalam waktu semalam. Ini memerlukan perjuangan panjang dan komitmen kuat masing-masing anggota kelompok.

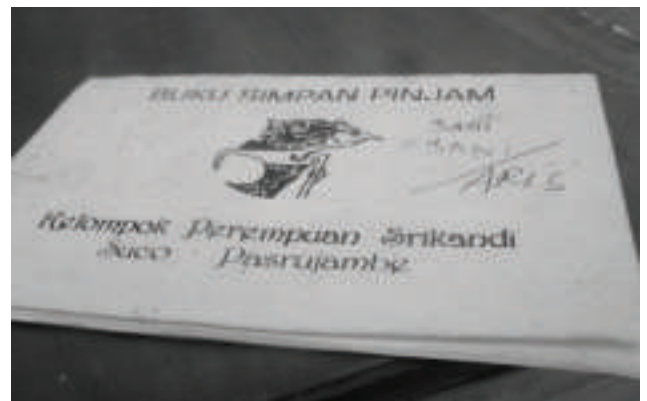
Pasang surut kelompok dalam membentuk kemandirian terasa sejak awal berdiri. Mulanya, anggota kelompok hanya 22 orang dan semuanya aktif menabung. Namun kegiatan hanya diisi dengan diskusi, membuat beberapa anggotanya merasa bosan. Kemudian mereka mulai tidak aktif sebagai anggota kelompok, hingga tersisa 17 orang. Seiring berjalannya waktu, terjadi penambahan anggota besar-besaran mencapai 90 orang. Ternyata, ada isu jika

bergabung dan menabung di kelompok Srikandi akan mendapat hadiah. Maka, banyak orang berkeinginan bergabung. Namun isu tersebut tidak terbukti, maka satu persatu anggota berkurang lagi. Dijelaskan Sani, selain iming-iming yang tidak terbukti, banyaknya kelompok di desa yang serupa menjanjikan iming-iming, turut menjadi faktor penyebab mundurnya mereka. Tahun 2009, mulai banyak anggota yang bergabung hingga mencapai 60 orang.

Ibu Sani menambahkan, untuk mensiasati banyaknya anggota yang keluar masuk, diterapkan aturan yang mewajibkan tiap orang yang ingin jadi anggota Srikandi membayar simpanan wajib dan pokok serta mengikuti setiap pertemuan dan diskusi selapanan sekali. Terbukti, aturan ini mampu mencegah orang keluar dari kelompok.

Selain keberhasilan kelompok dalam membentuk kemandirian melalui unit-unit usaha, lainnya yakni beberapa anggota kelompok sudah berani berbicara menyatakan pendapatnya di depan umum, sehingga menurut Sani, mereka mau menjadi pengurus.

Mengenai kedepannya, Sani menjawab: "Mudah-mudahan kelompok bisa makin maju usahanya, dan kerja sama Kalyanamitra dengan Gemapalu terus untuk memberdayakan kelompok, tidak berhenti sampai di sini". *** (NR)



Warung Soto dan Pembuatan Aksesoris

Muara Baru, perkampungan padat penduduk yang terletak di sebelah utara, Jakarta. Sebagai perkampungan padat penduduk di tepi pantai, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Sama seperti kehidupan nelayan di daerah lainnya di Indonesia, kehidupan nelayan di daerah Muara Baru pun masih jauh dari sejahtera. Apalagi bagi mereka yang hanya nelayan kecil dan menggunakan peralatan tradisional. Hasil tangkapan pun dipengaruhi kondisi laut yang tercemar oleh limbah rumah tangga ataupun pabrik.

Dengan penghasilan yang tidak menentu, akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Di tengah himpitan ekonomis yang demikian, biasanya perempuan dan anak yang menanggung semua itu. Mereka harus berjuang keras mencari nafkah dengan melakukan segala pekerjaan yang memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di Muara Baru, juga terdapat komunitas dampingan Kalyanamitra. Sebelum Kalyanamitra masuk di komunitas ini, sebagian besar anggota kelompok tidak mempunyai kegiatan. Kegiatan yang biasa mereka lakukan setelah urusan rumah tangga usai hanya ngerumpi dengan tetangga. Namun setelah Kalyanamitra masuk, mereka sangat merasakan manfaatnya karena ada pertemuan-pertemuan secara berkala dilakukan.

Permasalahan ekonomi sebagai keluarga nelayan yang penghasilannya tak menentu juga dirasakan anggota komunitas. Untuk mengatasi masalah perekonomian keluarga yang muncul, anggota komunitas yang terbagi menjadi dua kelompok, yakni Kelompok Marlina dan Kelompok Mandiri melakukan rangkaian diskusi untuk bisa

melahirkan usaha bersama.

Dari diskusi panjang yang dilakukan anggota kelompok, maka diperoleh kesepakatan bahwa Kelompok Mandiri memilih warung soto sebagai usaha bersama. Pilihan ini didasarkan atas pemikiran bahwa semua orang membutuhkan makan. Di samping itu, dari pengalaman pribadi anggota kelompok, sebagian besar mereka lebih senang membeli makanan yang sudah siap saji karena lebih menghemat waktu.

Di Kelompok Marlina mereka memilih untuk mengembangkan pembuatan aksesoris yang selama ini mereka tekuni. Walaupun sebelumnya pembuatan aksesoris ini sudah ada, namun peralatan yang mereka miliki masih sangat terbatas. Hal itu kemudian mempengaruhi hasil produksi. Aksesoris yang mereka buat berupa jepit rambut, bando, ikat rambut dan lainnya.

Pemasaran aksesoris ini masih bersifat personal. Aksesoris yang mereka hasilkan biasanya akan diambil oleh pedagang keliling. Kemudian akan dipasarkan dari rumah ke rumah menyusuri gang demi gang. Hal itu tentu saja kurang efektif, karena hasil produksi akhirnya menumpuk di rumah. Dan, pemasaran sifatnya hanya menunggu. Kedepan, anggota komunitas berharap dapat bekerjasama untuk memasarkan hasil produksi.

Untuk mengantisipasi kebosanan dari pelanggan, warung soto yang dikelola oleh Kelompok Mandiri akhirnya tidak hanya menyajikan menu soto. Ada banyak menu yang mereka sajikan, dan setiap harinya berganti. Agar tidak mempengaruhi rutinitas sebagai ibu rumah tangga, anggota kelompok bersepakat bahwa warung dibuka setelah urusan rumah tangga selesai. Biasanya warung baru buka menjelang jam 12 siang, atau menjelang makan siang.

Demikian pula Kelompok Marlina, mereka berkumpul untuk membuat aksesoris setelah urusan rumah tangga beres. Untuk tahapan-tahapan membuat aksesoris yang tidak memerlukan mesin jahit, anggota kelompok dapat membawa pulang bahan-bahan aksesoris untuk dikerjakan di rumah.

Usaha bersama yang digagas Kalyanamitra dan anggota komunitas diharapkan dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan dari program yang selama ini berjalan. Kalyanamitra sebagai pendamping komunitas sangat mendukung kegiatan tersebut, karena di samping untuk menambah penghasilan bagi anggota komunitas, juga merupakan wadah berkumpulnya anggota komunitas. *** (JK)



Komunitas Muara Baru.

Bagaimana Merayakan Hari Perempuan Internasional?

Oleh: I Gusti Agung Ayu Ratih*

Segera setelah Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen. Soeharto sebagai Presiden RI kedua pada 1967, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) memutuskan untuk tidak lagi merayakan Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret dengan alasan perayaan hari tersebut diprakarsai negara-negara komunis. Keputusan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan Kowani untuk memberi dukungan penuh terhadap Soeharto dalam operasi pembersihan terhadap organisasi-organisasi dan individu-individu yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September (G30S). Sebelumnya, Kowani sudah memecat Gerwani sebagai anggota dan Ketua Kowani, dr. Hurustiati Soebandrio, setelah penangkapan suaminya, Wakil PM Soebandrio, yang dituduh antek komunis.

Keputusan Kowani menolak merayakan Hari Perempuan Internasional adalah keputusan yang tragis. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari tersebut lahir dari tradisi gerakan sosialis dan negeri pertama yang meresmikannya sebagai hari besar nasional - atas desakan Alexandra Kollontai setelah Revolusi Oktober 1917 - adalah Uni Soviet. Namun semangat yang ditebar hari bersejarah ini: penghormatan terhadap kaum buruh perempuan serta perjuangan perempuan untuk kesetaraan, keadilan dan perdamaian sudah melampaui batas-batas negara dan ideologi berbagai bangsa di dunia. Kowani sendiri lahir dari rahim pejuang-pejuang perempuan yang sejak awal abad ke-20 mengupayakan perbaikan nasib perempuan dari kalangan rakyat jelata. Jika kita menilik catatan kongres demi kongres perempuan sejak 1928, akan tampak bahwa perbincangan tentang kondisi buruh perempuan selalu masuk dalam agenda pertemuan-pertemuan mereka. Dengan penyerahan diri tanpa syarat kepada negara Orde Baru,

Kowani telah mengingkari upaya gerakan perempuan di tingkat internasional untuk mendesak keberadaannya tanpa kaitan dengan negara, sekaligus mengingkari sejarahnya sebagai rumah gerakan perempuan Indonesia yang tumbuh besar secara mandiri.

Seperti sudah banyak diulas organisasi-organisasi perempuan yang tumbuh di dekade awal pemerintahan Orde Baru tak lain merupakan alat negara untuk mengendalikan gerak perempuan dan menjalankan program-program pembangunan, apakah itu industrialisasi besar-besaran atau Keluarga Berencana. Penetapan peran dan posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pendamping suami sekaligus pencari nafkah tambahan dalam sekian kebijakan negara sudah menjebak perempuan dalam bilik-bilik pemerahan tenaga kerja, tanpa politik, dan rentan terhadap kekerasan. Memang ketergantungan Orde Baru terhadap modal dan bantuan internasional memaksa pemerintah untuk selalu mempertimbangkan perbaikan status perempuan sesuai dengan tuntutan forum-forum internasional yang membicarakan soal perempuan sejak pertengahan 1970an. Atas desakan internasionallah lahir kementrian urusan peranan wanita yang kemudian menjadi kementrian peranan perempuan. Namun, negara pada dasarnya masih melihat perempuan sebagai sumber daya yang perlu dirawat ala kadarnya untuk menjaga kelancaran proyek-proyek pembangunan, bukan warga negara yang harus dijamin hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Adalah pejuang-pejuang perempuan pada awal 1980-an yang dengan kritis melihat bahwa penindasan terhadap perempuan sesungguhnya bersumber pada diskriminasi berbasis gender dan tidak dapat diatasi hanya dengan program-program

Adalah pejuang-pejuang perempuan pada awal 1980-an yang dengan kritis melihat bahwa penindasan terhadap perempuan sesungguhnya bersumber pada diskriminasi berbasis gender dan tidak dapat diatasi hanya dengan program-program pemberdayaan semata. Perbaikan status perempuan tidak akan terjadi selama negara tidak menjamin kesetaraan hak bagi perempuan sebagai manusia.



pemberdayaan semata. Perbaikan status perempuan tidak akan terjadi selama negara tidak menjamin kesetaraan hak bagi perempuan sebagai manusia. Mereka membentuk kelompok-kelompok perempuan mandiri untuk menyebarkan gagasan tentang pentingnya kesadaran perempuan akan jatidirinya sebagai manusia. Mereka juga mempersoalkan bagaimana negara membatasi peran perempuan di wilayah rumah tangga sementara ribuan perempuan desa digalang menjadi buruh industri dan buruh migran. Pertemuan mereka dengan pejuang-pejuang perempuan manca negara meyakinkan mereka bahwa perempuan seharusnya memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dan kemerdekaannya bukan karena keibuannya, tetapi lebih karena kemanusiaannya.

Seperempat abad sudah berlalu sejak segelintir pejuang perempuan memberanikan diri untuk menerobos sekat-sekat yang dibuat negara dan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan un-

tuk bersuara serta memperjuangkan kepentingannya secara terbuka di tingkat nasional maupun internasional. Tantangan yang dihadapi gerakan perempuan di masa globalisasi ini serupa dengan yang mencetuskan Hari Perempuan Internasional seabad lalu: buruknya kondisi kerja bagi buruh perempuan. Setelah gagal membangun industri nasional yang kukuh, sejak pertengahan 1980an pemerintah Indonesia terus-menerus mendorong pengiriman ratusan ribu buruh migran perempuan ke pelbagai penjuru dunia tanpa memberikan pembekalan dan perlindungan yang memadai. Sementara bertrilyun-trilyun rupiah telah masuk ke dalam kas negara dan kocek para penjual tubuh perempuan, buruh perempuan Indonesia menjadi pariah di negeri orang. Apa kira-kira makna Hari Perempuan Internasional bagi mereka?

** Direktur Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta.*

Seperempat abad sudah berlalu sejak segelintir pejuang perempuan memberanikan diri untuk menerobos sekat-sekat yang dibuat negara dan membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk bersuara serta memperjuangkan kepentingannya secara terbuka di tingkat nasional maupun internasional.

Syarifah Sabaroedin: *Lahir Sebelum Masanya, Pergi Sebelum Waktunya*

Oleh: Liza Hadiz

Perkenalan

Selepas kuliah, Mbak Ifa sudah menunggu saya. Seperti yang ia sampaikan via telepon malam sebelumnya, ia ingin mengajak saya bicara tentang suatu hal...entah apa pikir saya waktu itu. Kami naik ke dalam mobil “antik”nya itu yang sudah dikenal di kampus sebagai mobilnya “Mbak Ifa”, begitu panggilan akrab Syarifah Sabaroeddin, dosen Jurusan Krimnologi FISIP UI itu. Saya pertama kali mengenalnya ketika mengambil mata kuliah yang waktu itu di bawah asuhamnya, “Sosiologi Penjara”. Pendekatannya yang berbeda dan kritis dalam melihat sebuah fenomena sosial banyak memengaruhi saya ketika mahasiswa.

Setelah beberapa menit perjalanan, kami sampai di sebuah rumah makan kecil. Ia memesan makanan dan minuman untuk kami berdua. Tidak pernah saya duga bahwa pertemuan itu akan mengubah jalan hidup saya...

Tak lama setelah pertemuan kami itu, Mbak Ifa membawa saya ke Kalyanamitra, yayasan yang turut ia dirikan. Bagi saya yang waktu itu baru mulai menggeluti isu-isu perempuan dan pemikiran-pemikiran feminisme, Kalyanamitra menjadi wadah untuk mempertajam kesadaran saya mengenai diskriminasi terhadap perempuan dan tempat mendapatkan teman-teman “sepemikiran”. Selama bekerja sekitar empat tahun di Kalyanamitra, Ifa pun (yang kemudian tidak mau dipanggil “Mbak”) menjadi sahabat saya, teman bertukar pikiran, dan teman yang membantu ketika saya mengalami kesusahan... dengan mobil antiknya itu Ifa pernah mengantar saya ke dokter dan menunggui saya di rumah sakit.

Tak terasa semua itu terjadi 20 tahun yang lalu. Ketika feminisme masih merupakan sebuah kata yang dianggap subversif di tanah air kita. Ketika lembaga-lembaga akademik yang konservatif itu tidak mau diasosiasikan dengan pemikiran maupun gerakan feminisme. Ketika rezim yang berkuasa menghantam semua pemikiran yang melawan status quo. Ketika feminisme belum diterima di dalam lingkungan aktivisme yang saat itu masih didominasi oleh aktivis laki-laki, dan ketika isu perempuan dianggap bukan isu hak asasi manusia. Saat itu sudah ada seorang Ifa; perempuan yang menyebut dirinya sebagai seorang

feminis lesbian. Sosok yang sudah dengan lantang berbicara mengenai penindasan perempuan di forum-forum dalam negeri dan internasional, ketika gerakan feminisme di Indonesia dianggap tidak relevan bagi upaya melawan pemerintahan yang otoriter.

Ide dan Pemikiran

Pada periode “kegelapan” itu dan hingga saat ini banyak pemikiran Ifa yang masih sangat relevan dengan kondisi perempuan Indonesia saat ini. Membicarakan sosok Ifa tidak bisa lepas dari pemikirannya yang hingga saat ini pun masih dipandang kontroversial oleh berbagai kalangan. Suka atau tidak suka dengan gagasan-gagasan Ifa, tidak bisa dipungkiri bahwa pemikirannya banyak menyumbang terhadap diskursus mengenai seksualitas dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kalau boleh, saya ingin mengungkap sedikit tentang pokok-pokok pikiran Ifa yang menurut saya menyumbang pada Kalyanamitra dan pemikiran feminisme di Indonesia secara umum. Walaupun pokok-pokok pikiran ini secara teoretis bukan beliau yang pertama kali mengembangkannya, tetapi dalam batas tertentu, dapat dikatakan beliau telah mengembangkannya menjadi suatu diskursus yang mewarnai gerakan perempuan di Indonesia. Dan sekali lagi, yang dipaparkan berikut ini hanya mewakili interpretasi saya pribadi terhadap pemikiran beliau menyangkut beberapa isu.

Salah satu pemikiran Ifa yang mewarnai analisis maupun aktivismenya adalah kritik tajamnya terhadap hubungan heteroseksual monogamis. Sebagaimana feminisme radikal, ia pun melihat hubungan tersebut sebagai “cornerstone” sistem patriarkat. Ia melihat bentuk hubungan tersebut sebagai penyokong dari segala bentuk penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Oleh karena itu, beliau menantang “kewajaran” institusi perkawinan. Ia juga bersikap sangat kritis terhadap semua hubungan monogami karena sebagaimana tesis “the personal is political” ia melihat bentuk hubungan tersebut rentan menjadi arena relasi dominasi dan subordinasi. Aktivisme Ifa sebagai seorang feminis lesbian telah banyak menyadari teman-teman aktivis perempuan di Indonesia (bahkan mereka yang bergiat di Kalyanamitra) dan teman-teman pada gerakan lainnya bahwa orientasi seksual bukanlah hal



Syarifah Sabaroedin dan beberapa aktivis gerakan perempuan saat Peluncuran dan Diskusi Buku

yang alamiah, tetapi dibentuk secara sosial, dan homoseksualitas bukanlah sebuah perilaku seksual menyimpang. Saat ini pemikiran-pemikiran tersebut mungkin sesudah banyak terdengar, tetapi 20 tahun lalu hal ini masih terlalu “radikal” dan membicarakan orientasi seksual secara terbuka merupakan hal yang tabu. Ifa yang juga pernah aktif di Koalisi Perempuan Indonesia, dapat dikatakan merupakan salah satu sosok yang turut menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan perempuan lesbian selanjutnya dan menempatkan isu orientasi seksual dalam peta politik gerakan perempuan Indonesia.

Di bidang akademik, Ifa melakukan kajian terhadap pelecehan seksual dan mempopulerkan istilah tersebut sebagai terjemahan “*sexual harassment*”. Walaupun Ifa merupakan sosok yang kontroversial, terutama di lingkungan universitas di tempat ia berprofesi, Ifa bisa diterima (atau mungkin tepatnya ditoleransi) di lingkungan tersebut. Mungkin karena perspektifnya yang berbeda dan mengusik kesadaran itu akhirnya disambut oleh perkembangan zaman. Dengan semakin “mewabahnya” pemikiran-pemikiran tentang apa yang kerap disebut “isu perempuan”, studi gender dan feminisme yang awalnya tampak begitu kontroversial dan hanya didengungkan oleh “sosok-sosok yang kontroversial” di kampus-seperti Ifa, lambat laun masuk ke dalam *mainstream* akademik tempat beliau mengajar.

Ifa yang melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai manifestasi relasi kekuasaan gender, juga terlibat di bidang perbaikan hukum dengan menjadi anggota tim perumus Rancangan Undang-undang Antikekerasan dalam Rumah Tangga. Semasa hidupnya, ia juga concern dengan munculnya UU Pornografi. Sebagai counter terhadap undang-undang tersebut ia menerbitkan buku “Kebertubuhan Perempuan dalam

Pornografi” pada 2006.

Sesuai tesis feminisme “*the personal is political*”, Ifa juga mempraktikkan kehidupan yang mencerminkan pemikiran kritisnya. Selama masa hidupnya, kehidupan pribadi beliau tidak luput dari komentar, penilaian, hingga kritik yang mempertanyakan konsistensinya, termasuk dari teman-temannya sendiri di lingkungan gerakan perempuan.

Perintis Gerakan Feminisme

Hal yang menambahkan keunikan pribadi Ifa yang juga banyak diketahui oleh teman-temannya adalah bahwa beliau merupakan orang yang sangat spiritual. Kepercayaannya terhadap hal-hal yang bersifat “gaib” membuatnya dijuluki sebagai “dukun feminis” oleh teman-teman akrabnya. Kalau feminisme radikal kerap mengajak perempuan untuk “merayakan spiritualitas perempuan” yang telah dibunuh selama sejarah patriarkat, demikian pula Ifa. Memang itulah keunikan Ifa, mensintesis antara feminisme, lesbianisme, dan spiritualisme. Meminjam kata-kata yang mungkin terdengar klise, Ifa adalah sosok perempuan yang “*fearless*”. Gagasan-gagasannya mengenai feminisme lahir jauh sebelum masa di mana pemikiran tersebut dapat diterima di Indonesia. Wafatnya beliau pada 1 Oktober 2008 dalam usia 59, usia yang relatif muda, menandai kepergian terlalu dini salah seorang perintis gerakan feminisme di tanah air. Menjadi kewajiban kita semua yang hidup melampauinya, untuk memastikan bahwa nama dan kontribusinya terdokumentasi di dalam catatan sejarah gerakan perempuan Indonesia dan tetap hidup bersama kita. ***

Merebut Hak Pilih Perempuan

*"Mr. President, how long must women wait to get their liberty?
Let us have the rights we deserve."
(Alice Paul, 1885-1977)*

Iron Jawed Angels adalah gambaran lika-liku perjuangan perempuan untuk memperoleh hak-haknya. Film ini menjadi potret bahwa perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam ruang politik tidaklah mudah. Diperlukan waktu dan energi yang panjang, karena untuk menembus benteng bernama *patriarkhal* sangat sulit.

Film garapan Katja von Garnier ini mengisahkan perjalanan hidup Alice Stokes Paul (11 Januari 1885-9 Juli 1977) yang menjadi pimpinan gerakan hak pilih (suffragist) Amerika. Bersama kawannya, Lucy Burns dan lainnya, memimpin kampanye memperjuangkan hak pilih perempuan. Perjuangan Alice dan kawan-kawannya terbayar dalam Amendemen ke 19 Konstitusi Amerika Serikat tahun 1920.

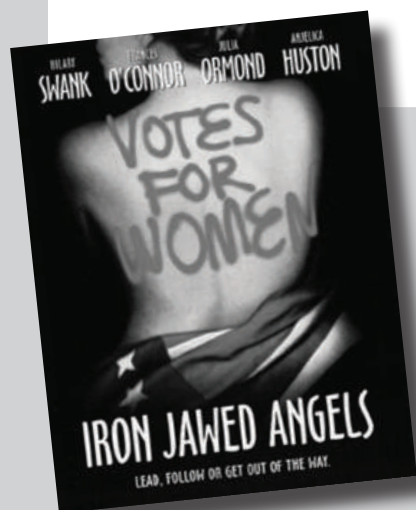
Philadelphia tahun 1912, dua aktivis perempuan bersemangat tinggi dan memiliki tekad kuat untuk memperjuangkan hak pilih perempuan dalam politik, Alice Paul dan Lucy Burns bertemu dengan Carrie Chapman Catt dan Anna Howard Shaw (Lois Smith) dari NAWSA (National American Woman Suffrage Association). Tujuan mereka menemui dua orang aktivis senior tersebut untuk meminta persetujuan mengambil alih komite NAWSA di Washington D.C. Berbeda cara pandang dan berpikir, adalah hal yang membedakan dua generasi ini. Paul dan Burns dengan semangat muda dan berjiwa pemberontak cenderung memilih cara-cara radikal, dengan mendesak pemerintah untuk segera meng-amandemen konstitusi tentang hak pilih perempuan. Berbeda dengan Catt dan Shaw yang konservatif, yang lebih mengedepankan pendekatan *state-by-state*.

Walaupun cara berpikir berbeda, namun dengan kesamaan perjuangan dalam hal posisi perempuan di politik Amerika, mendorong Shaw memberi izin Paul dan Burns untuk mengambil alih komite NAWSA di Washington, asalkan mereka mencari dana sendiri. Hal pertama yang direncanakan untuk mencapai tujuan itu yakni dengan membuat parade mempromosikan hak pilih perempuan, dan merekrut tim sukarelawan. Teman semasa kuliah Paul, yakni Mabel Vernon, serta pekerja industri berkebangsaan Polandia, Ruza Wenclawska, dan Doris Stevens seorang pekerja sosial; menjadi sukarelawan yang bersedia mendukung perjuangan Paul dan Burns.

Ketika acara penggalangan dana, Paul bertemu dengan Inez Mulholland, seorang pengacara buruh, dan mengajaknya untuk bergabung dan bersedia menjadi sosok utama dalam parade. Paul juga bertemu dengan seorang kartunis surat kabar Washington, Ben Weissman, dan mengajaknya untuk mendukung gerakan ini dengan mengangkatnya ke media.

Awalnya parade yang mengkampanyekan hak pilih perempuan ini berjalan lancar dan terkendali. Namun kemudian berubah menjadi rusuh tatkala sekelompok laki-laki yang tidak senang dan mengejek aksi ini menyerang para partisipan aksi, yang semuanya perempuan. Situasi ini langsung mendapat perhatian Presiden Woodrow Wilson yang saat itu baru tiba di Washington, karena memang parade ditujukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden. Keesokan harinya, peristiwa ini menjadi berita utama di media massa dan Paul-Burns sangat puas terhadap pencapaian tersebut. Keadaan berhasil mempertemukan delegasi NAWSA yang dipimpin Paul dengan Presiden yang berjanji mengkaji ulang isu yang disasar, dan mereka diberi keleluasaan untuk melakukan lobby politik.

Peristiwa kerusuhan di parade ternyata membuat perpecahan di dalam NAWSA, terutama antara Paul dan Catt. Kemarahan Catt makin meruncing setelah Paul dan Burns mendapat dana di luar NAWSA untuk menerbitkan suratkabbar yang tujuannya ajakan kepada perempuan untuk melakukan boikot terhadap Presiden dalam pemilihan umum yang akan datang. Perbedaan pendapat ini akhirnya membuat Paul-Burns, dan beberapa sukarelawan lain yang berpihak padanya meninggalkan NAWSA dan membentuk NWP (The National Woman's Party). Persaingan antara NAWSA dan NWP mulai tumbuh ketika NAWSA



Iron Jawed Angels

Sutradara
Katja von Garnier
Penulis Skrip
Jennifer Friedes
Produksi
HBO Film
Durasi
124 menit
Pemain
Hilary Swank
Frances O'Connor
Julia Ormond
Anjelica Huston



mengkritik strategi NWP dalam mendesak pemerintah dengan melakukan aksi di depan Gedung Putih dan menggalang simpati publik. NWP lebih lantang lagi dalam mengampanyekan amandemen konstitusi dengan melakukan orasi ke berbagai negara bagian dengan Mulholland sebagai orator.

Perang dunia I pecah, Amerika dalam keadaan siaga militer dan merupakan keuntungan Presiden yang diprediksikan akan kembali menang di pemilihan umum. Keadaan ini tidak menyurutkan Paul untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Puncaknya, mereka melakukan aksi di depan Gedung Putih dengan membawa tuntutan kepada Presiden. Aksi ini dilakukan setiap hari. Keadaan Negara yang sedang menghadapi perang mengubah pandangan publik terhadap perjuangan aktivis NWP. Aksi dibubarkan paksa oleh sekelompok laki-laki yang tidak simpatik. Aktivis NWP, salah satunya Burns, ditangkap dengan tuduhan mengganggu ketertiban lalu lintas, walaupun mereka beraksi di trotoar jalan.

Menolak membayar denda untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan, para aktivis NWP dijatuhi hukuman 60 hari penjara di Occoquan, sebuah penjara perempuan di Virginia. Hal serupa terjadi pada Paul ketika melakukan aksi yang sama di depan Gedung Putih. Paul digelandang ke penjara dengan tuduhan yang sama. Situasi ini dimanfaatkan Catt untuk melakukan lobby politik terhadap Presiden, namun Presiden tetap bersikukuh dengan pendiriannya menolak amandemen konstitusi mengenai hak pilih perempuan.

Dalam penjara, Paul melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk penolakan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Aksi mogok makan Paul diikuti oleh aktivis NWP lainnya. Alih-alih menghentikan aksi, Paul dan lainnya dipaksa untuk menelan makanan dengan cara memasukan selang makanan ke mulut dan hidung. Namun penganiayaan ini akhirnya terbongkar setelah catatan-catatan Paul selama dipenjara diekspos di media. Tersebarnya berita tersebut mengubah

opini publik tentang perjuangan aktivis NWP, dan menjuluki mereka "iron jawed angels". Kesempatan ini dimanfaatkan NAWSA untuk mendesak Presiden Wilson mengamandemen peraturan ini dan membebaskan aktivis NWP dari penjara.

Pada 1920, sebanyak 36 wilayah telah menyetujui untuk meratifikasi amandemen, di mana Tennessee menjadi negara terakhir dan juga penentu jebolnya undang-undang ini. Pada 26 Agustus 1920, amandemen ke-19 memberikan perempuan hak pilih dan ditetapkan menjadi hukum konstitusional.

Salah satu bagian yang paling menarik dalam film ini yakni dialog antara Alice Paul dengan seorang dokter laki-laki, ahli kejiwaan di penjara dan memberikan pertanyaan mengenai tujuan perjuangan Alice: *"Look into your own heart. I swear to you, mine's no different. You want a place in the trades and professions where you can earn your bread, so do I. You want some means of self-expression, some way of satisfying your own personal ambitions, so do I. You want a voice in government under which you live, so do I. What is there to explain?"*

Pernyataan ini menohok relung terdalam sang dokter yang juga laki-laki, dalam memahami tujuan perjuangan kelompok suffragis. Dan bila itu kita refleksikan saat ini, maka kaum perempuan masih hidup dalam kungkungan budaya yang dipraktikkan negara. Akses dan kesempatan perempuan untuk memperoleh haknya, baik sebagai individu maupun warga negara, masih dibatasi. Perjuangan Alice Paul dan kawan-kawannya menjadi cermin pemberontakan perempuan terhadap sistem hukum negara yang tidak mengakui dan mengikutsertakan perempuan mulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan. Perjuangan perempuan masih sangat panjang, tentunya. Akar-akar patriarkhal bertumbuh dalam, yang terkadang tidak kita sadari. Bersikap kritis dan terus melawan segala bentuk penindasan menjadi hal yang harus selalu kita tanamkan dan lakukan demi mencapai kehidupan kita yang lebih baik. ***** (IK)

Fakta Sejarah Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia oleh Rezim Orde Baru

Buku yang berjudul Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia merupakan disertasi akademis Saskia E. Wieringa, untuk proyek penelitian di Indonesia mengenai “Gerakan dan Organisasi Kaum Perempuan dalam Perspektif Sejarah”, yang berlangsung Desember 1982 sampai Desember 1985. Buku terbitan Kalyanamitra dan Garba Budaya ini banyak diminati oleh para aktivis, mahasiswa, dan para peneliti karena mengungkap fakta sejarah tentang penghancuran gerakan perempuan di Indonesia yang dilakukan rezim Orde Baru.

Melalui buku ini, pembaca mendapat pencerahan tentang organisasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang sebenarnya turut membangun sejarah gerakan perempuan Indonesia, namun dicap sebagai perempuan bejat, tidak bermoral, dan organisasi komunis pendukung PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam peristiwa Oktober 1965 oleh rezim Orde Baru.

Dalam perspektif penelitian Saskia, Gerwani ditempatkan sebagai korban peristiwa politik Oktober 1965. Penguasa rezim Orde Baru menggunakan simbol seksualitas perempuan (Gerwani) untuk menghancurkan gerakan PKI yang dianggap sebagai gerakan makar untuk merebut kekuasaan rezim Orde Baru.

Berdasarkan penelitian Saskia yang dilakukan dengan menggunakan perspektif feminisme, ditemukan fakta bahwa Gerwani adalah organisasi massa perempuan yang suaranya sangat keras dalam membela hak-hak perempuan dan anak-anak sesuai dengan keadaan zamannya. Mulanya organisasi yang berdiri tahun 1950 ini bernama Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar). Gerwis me-

nempuh tiga medan perjuangan: (1) Medan politik: menghadapi unsur-unsur “reaksioner” antara lain yang telah mengorganisasi Peristiwa 17 Oktober 1952 untuk menuntut pembubaran parlemen masa presiden Sukarno; (2) Medan perempuan atau feminisme: melawan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 dan menyokong perjuangan untuk undang-undang perkawinan yang demokratis yang diajukan oleh Kongres II KWI tahun 1952; (3) Medan daerah; giat dalam gerakan tani melawan upaya pemerintahan mengusir petani dari tanah garapannya. Gerwis kemudian berubah menjadi Gerwani pada tahun 1954. Selanjutnya, Gerwani menjadi organisasi yang bekerja menggalang massa perempuan seluas-luasnya dan melakukan advokasi di parlemen.

Bagi Gerwani, musuh ideologis diskriminasi terhadap perempuan adalah bersumber pada feodalisme (tradisi, nilai, dan norma warisan keterbelakangan budaya kerajaan-kerajaan pribumi dan kolonialisme Belanda seperti poligami, kawin paksa, perdagangan perempuan untuk dijadikan gundik dan pekerja seks), imperialisme dan kolo-

Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia

Judul Asli
The Politization of Gender Relations in Indonesia Women's Movement and Gerwani until the New Order State



nialisme (bidang ekonomi: modal monopoli asing yang menghisap kaum tani dan buruh, di bidang politik: penjajahan atas Irian Barat, di bidang budaya: berkuasanya produk film-film Hollywood).

Strategi perjuangan massa di medan perempuan (feminisme) dan daerah, Gerwani melakukan kegiatan pemberantasan buta huruf, kursus-kursus politik, penanganan bencana alam, mengurus anggota yang menjadi korban kekerasan dan poligami, dan mengurus Taman Kanak-Kanak. Selain itu, Gerwani juga mendukung perjuangan menuju *land reform* untuk kesejahteraan hak-hak buruh petani perempuan yang miskin. Gerwani mendukung perjuangan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Perjuangan Gerwani juga dilakukan di tingkat parlemen melalui advokasi RUU Perkawinan yang menjunjung tinggi prinsip hak-hak perempuan. Di medan politik nasional, Gerwani mendukung politik Soekarno terutama sejak tahun 1959, yakni politik anti-neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialism (anti-nekolim). Dalam pemikiran Gerwani, kemajuan perempuan Indonesia dihambat oleh kungkungan kekuasaan tuan tanah feodal dan kekuasaan modal asing (imperialis).

Selain mengungkap bahwa sesungguhnya Gerwani adalah organisasi massa perempuan yang aktif dan militan, Saskia berhasil menggali fakta sejarah gerakan perempuan. Gerwani merupakan kelanjutan perjuangan enam organisasi perempuan yang ada masa perjuangan kemerdekaan menuju revolusi nasional demokrasi, yakni Istri Sedar (Bandung), Rukun Putri Indonesia (Rupindo, Semarang), Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo, Kediri), Wanita Madura (Madura), dan Perjuangan Putri Republik Indonesia (Pasuruan).

Pada masa revolusi nasional, para aktivis yang mendirikan Gerwani adalah pejuang gerakan bawah tanah yang terlibat dalam satuan-satuan gerilya melawan Jepang dan Belanda, sedangkan masa pemerintah Soekarno, Gerwani satu-satunya organisasi perempuan yang merambah ke pentas politik nasional.

Pemikiran dan perjuangan Gerwani pada inti-

nya membentuk perempuan menjadi militan untuk menuntut hak-haknya. Gerwani tidak ada hubungannya dengan simbol seksualitas yang buruk yang dikonstruksi rezim Orde Baru. Simbolisasi Gerwani sebagai perempuan bejat ini merupakan bagian penting Peristiwa Oktober 1965 yang menjadi awal berkuasanya Orde Baru. Gerwani difitnah terlibat dalam gerakan 30 September (G30 S) yang menculik dan membunuh enam Jenderal dan satu Letnan Angkatan Darat di desa Lubang Buaya, Jakarta. Menurut Wieringa, kampanye fitnah dibangun oleh Angkatan Darat untuk melakukan brainwashing terhadap opini masyarakat atas komunisme yang sedemikian amoral dan anti-agama, sehingga mengakibatkan perempuan melupakan tugas-tugas keperempuanan mereka sebagai istri yang setia, ibu yang baik, dan taat pada ideologi Pancasila dan agama. Tetapi, malah giat dalam politik dan tidak bersusila.

Kampanye Angkatan Darat berhasil memanipulasi Gerwani yang militan menjadi perempuan yang bejat moral. Kampanye ini membangun kebencian kolektif dan tuntutan pembubaran organisasi komunis dan Gerwani. Pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam Partai Komunis Indonesia dan Gerwani dibantai, ditangkap dan menjadi tahanan politik selama 14 tahun (1965-1979).

Pemikiran dan strategi perjuangan Gerwani sebenarnya masih sangat relevan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Indonesia saat ini yang sedang krisis akibat kekuasaan rezim neo liberal.

Pada masanya Gerwani berhasil menerobos pembagian kerja secara gender, dengan merumuskan “Dua Segi Perjuangan”. Segi pertama, perjuangan umum berdasarkan asumsi bahwa feodalisme, imperialisme, dan kolonialisme adalah musuh bersama kaum laki-laki dan perempuan. Segi kedua, perjuangan khusus bahwa perempuan menjadi korban feodalisme, imperialisme, dan kolonialisme karena adanya hubungan gender yang tidak adil. Sudah saatnya, gerakan perempuan belajar dari strategi perjuangan Gerwani untuk menghancurkan sistem kapitalis yang patriarkhis. *** (RH)

Penulis
Saskia Eleonora Wieringa
Penerbit
Kalyanamitra dan Garba Budaya
Cetakan
Agustus 1999
Halaman
593 hal +xxxix

Wanita Perkasa

Sejak awal dia melangkah
ta' da sedikit pun rasa bersalah
ker'na memang dia tak bersalah
apakah salah bila kata hati merambah
menuju dan mencari muara kata-kata 'tuk men-
curah.

Sama sekali tak terbesit pada dirinya
bahwa suatu ketika apa yang dicurahkan menjadi
petaka
dari rentetan petaka yang sudah dialami sebelum-
nya;

perlakuan tidak adil dan semena-mena.

Dia ingin bicara tentang deritanya

tentang dukanya

tentang hari-harinya

tentang ketak-berdayaannya saat terlentang pas-
rah

disuapi obat-obatan yang dia sendiri tidak tahu
untuk apa.

Sekarang aneka problema menggelutinya
tetapi dia tetap tegar, kokoh dan teguh
kendati air-mata menutupi penglihatannya;
apa salah saya?!

Berjuta kata sesal apa gunanya

sumpah serapah pun ta' kan menolongnya

hanya satu dambaannya:

perlakukanlah saya secara adil!

Apakah keadilan bukan milik orang kecil
apakah keadilan terdiri dari angka-angka nominal
lalu dimana letak kemanusiaan apabila keadilan
berseberangan dengan hati nurani dan moral.

Dia adalah wanita perkasa

yang melangkah tegar mengibaskan segala rasa
kendati hati kecilnya menjerit

berontak dan meronta

galau hatinya bersarang dan mengendap dihati
masyarakat.

Kini dari segenap pelosok Nusantara datang meng-
hampirinya

mendukungnya

membelanya

meneguhkannya

bahwa dia tidak sendirian

bahwa keadilan harus dinyatakan

bahwa ketimpangan dan kesenjangan sosial mesti
dilumpuhkan.

Berdirilah teguh menatap hari

acungkan lengan dan kepalkan:

Merdeka...!

adakah keadilan ditanah Merdeka ini...?

Bak asap hitam yang menggumpal akibat kedakan
demikianlah adanya saat sekarang ini

kerna ta' da asap bila tiada api

mari kita semua refleksi.

(Sumber: *blog.detik.com*)

****(NE)

Hari Perempuan Sedunia

Hari Perempuan Sedunia sesungguhnya adalah kisah
perempuan biasa yang menoreh catatan sejarah.
Suatu perjuangan berabad-abad lamanya untuk da-
pat berpartisipasi dalam masyarakat, sama halnya
kaum laki-laki. Di masyarakat Yunani Kuno, Lysistrata
menggalang gerakan perempuan mogok berhubungan
seksual dengan pasangan (laki-laki) mereka untuk
menuntut dihentikannya peperangan. Dalam Rev-
olusi Prancis, perempuan Paris berunjuk rasa menuju
Versailles sambil menyerukan "kemerdekaan, kes-
etaraan dan kebersamaan" menuntut hak perempuan
untuk ikut dalam pemilu.

Ide untuk memperingati hari Perempuan Sedun-
ia sebetulnya telah berkembang sejak seabad yang
lalu, ketika dunia industri ini sedang dalam masa
pengembangan dan pergolakan, peningkatan laju
pertumbuhan penduduk dan pemunculan paham-
paham radikal. Berikut adalah kronologi singkat be-
berapa kejadian penting yang mengiringi perjalanan
Hari Perempuan Sedunia:

1907

Para buruh perempuan di pabrik pakaian dan tekstil
(disebut 'buruh garmen') di New York, Amerika Serikat
mengadakan sebuah aksi protes. Mereka menentang
kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah
yang rendah. Polisi menyerang para pemrotes dan
membubarkan mereka.

1908

Sebanyak 15 ribu perempuan turun ke jalan sepanjang
kota New York menuntut diberlakukannya jam
kerja yang lebih pendek, menuntut hak memilih dalam
pemilu dan menghentikan adanya pekerja di bawah
umur. Mereka menyerukan slogan "Roti dan Bunga",
roti adalah sebagai simbol jaminan ekonomi dan bunga
melambangkan kesejahteraan hidup.

1909

Dalam rangkaian pendirian Partai Sosialis Amerika,
Hari Perempuan Nasional pertama kali diperingati pada
28 Februari di Amerika Serikat. Hari tersebut kemudian
terus diperingati perempuan pada setiap hari minggu
terakhir, bulan Februari sampai tahun 1913.

1910

Pertemuan kelompok sosialis internasional di Copenhagen, Denmark, memutuskan untuk memiliki Hari Perempuan Internasional sebagai penghormatan atas hak-hak asasi perempuan dan mendorong diperolehnya hak suara bagi semua perempuan di dunia. Keputusan ini diterima secara bulat oleh semua peserta yang diikuti oleh lebih dari 100 perempuan dari 17 negara, termasuk tiga perempuan pertama yang dipilih sebagai anggota parlemen Finlandia. Saat itu, mereka belum memutuskan pada tanggal berapa peringatan hari tersebut akan diadakan.

1911

Sebagai tindak lanjut keputusan yang telah diambil setahun yang lalu, Hari Perempuan Sedunia untuk pertama kalinya diperingati (pada 19 Maret) di Austria, Denmark, Jerman dan Swiss, di mana lebih dari sejuta perempuan dan laki-laki bersama-sama turun kejalan. Selain hak untuk ikut serta dalam pemilu dan posisi di dalam pemerintahan, mereka menuntut hak bekerja, kesempatan memperoleh pelatihan, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan.

Kurang dari seminggu sejak peringatan tersebut, pada 25 Maret terjadi insiden tragis di New York yang menewaskan lebih dari 140 buruh perempuan yang kebanyakan adalah imigran asal Italia dan Yahudi. Kejadian ini sangat mempengaruhi peraturan perburuhan di Amerika Serikat dan kondisi kerja yang menyebabkan insiden ini terjadi kemudian dikecam habis-habisan selama peringatan Hari Perempuan Internasional tahun berikutnya.

1913-1914

Sebagai bagian dari upaya perdamaian yang berkembang selama berlangsungnya Perang Dunia I, perempuan Rusia memperingati Hari Perempuan Internasional untuk pertama kalinya pada hari Minggu terakhir bulan Februari 1913. Di belahan Eropa lainnya, pada atau sekitar tanggal 8 Maret di tahun berikutnya, perempuan berunjuk rasa baik untuk memprotes perang maupun sebagai ungkapan solidaritas kepada saudara-saudara perempuan di manapun juga.

1917

Karena dua juta tentara Rusia terbunuh dalam perang, perempuan Rusia sekali lagi turun kejalan pada hari minggu terakhir di bulan Februari menyuarakan "Roti dan Perdamaian". Para pemimpin politik menentang unjuk rasa tersebut, tetapi para perempuan ini tetap bertahan. Dan sejarah mencatat bahwa empat hari kemudian, Czar (raja) turun tahta dan pemerintahan sementara mengakui hak perempuan untuk ikut serta dalam pemilu. Hari bersejarah itu jatuh pada tanggal 23 Februari di Kalender Julian yang digunakan di Rusia atau tanggal 8 Maret menurut kalender Gregorian (kalender Masehi yang juga kita gunakan). Dan sejak saat itulah, Hari

Perempuan Sedunia diperingati pada hari yang sama oleh perempuan di seluruh dunia.

Diskriminasi

Suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan yang didasarkan pada keyakinan patriarkis bahwa perempuan memiliki atribut yang tidak dikehendaki. Diskriminasi secara statistik berarti bahwa seorang perempuan bisa ditolak dalam sebuah pekerjaan bukan hanya karena dia seorang perempuan, namun karena dianggap secara statistik lebih cenderung memperhatikan keluarga dibandingkan laki-laki.

Feminisme

Secara umum, feminisme adalah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya yakni keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan akibat jenis kelaminnya. Di bawah payung lebar berbagai feminisme, ideologi ini menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab, pelaku, dari penindasan perempuan.

Gerakan Perempuan

Istilah ini biasa digunakan untuk menunjukan kepada perjuangan perempuan untuk kesetaraan. Gerakan perempuan adalah gerakan yang langsung dipimpin oleh perempuan dengan tujuan untuk kebaikan perempuan dan laki-laki, untuk keuntungan bagi semua manusia (*humanity*), yang terbagi dalam berbagai kemajemukan. Sering istilah gerakan perempuan digunakan secara bergantian dengan istilah lain yakni, gerakan feminis (*feminist movement*), dan gerakan pembebasan perempuan (*women's liberation movement*) tanpa membedakan satu sama lain. Meskipun demikian, istilah gerakan perempuan secara umum tidak selalu memiliki orientasi teoritis terhadap "feminisme", dan juga tidak selalu merujuk pada gerakan "pembebasan" (*liberation*) tertentu yang sangat kondang dan berkembang tahun 1960-an seperti gerakan-gerakan politik sayap "kiri" (*leftist politics*).

Komunitas

Suatu kelompok dengan kepentingan bersama. Dalam sosiologis, komunitas mempunyai beberapa makna, misalnya ia bisa berarti suatu kelompok lokal. Teori feminis mendefinisikan komunitas sebagai suatu jenis hubungan rasa kebersamaan dalam identitas dan kehangatan antara perempuan secara individual.*** (JK)



“Saya merasa berkat Kalyanamitra orang kemudian menjadi tahu bahwa ada persoalan perempuan melalui pintu masuk kekerasan terhadap perempuan.”
Ibu Sita Aripurnami (pendiri Yayasan Kalyanamitra)

“Kalyanamitra banyak sekali membuat perubahan-perubahan di tempat kita, terutama ibu-ibu.”
Ibu Michele (Komunitas Prumpung)

“Setelah mengenal Kalyanamitra, memperoleh pengetahuan baru berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menjadi lebih berani karena ketika terjadi sesuatu terhadap saya atau perempuan di lingkungan tempat tinggal, ada hukum yang melindungi dan tahu kemana harus mengadu.”
Ibu Sari Devi (Komunitas Prumpung)

“Kalyanamitra merupakan salah satu CSO yang muncul sebelum organisasi-organisasi CSO ada, saya melihat Kalyanamitra sebagai pionir dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, dia yang membuka mata adanya masalah-masalah gender dan isu-isu kekerasan.”
Ibu Danti (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Kalyanamitra punya kontribusi besar dalam berkembangnya wacana feminisme di Indonesia, tetapi tetap saja masih di antara aktivis, stakeholder. Biasanya stakeholder ini juga pengembangannya ke bawah tidak terlalu cepat atau tidak terprogram.”
Ibu Ari Sunarjati (SPSI Reformasi)

“Dalam usianya 25 tahun Kalyanamitra telah melakukan perubahan pola pikir dan perilaku kepada masyarakat, khususnya perempuan-perempuan baik muda dan dewasa baik melalui wacana dan memberi contoh langsung di komunitas-komunitas miskin.”
Ibu Mas’ruhhah (Komisioner Komnas Perempuan)

“Kalyanamitra telah berkontribusi sangat besar terhadap gerakan Sapa Institut, hingga akhirnya Sapa Institut mampu membangun komunitas-komunitas perempuan di tingkat lokal yang dampaknya sangat besar terhadap perubahan perempuan di Kabupaten Bandung.”
Ibu Sri (Sapa Institut)